

Judul : DPR Tagih Penuntasan Perekrutan Guru PPPK
Tanggal : Rabu, 25 Januari 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8



Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim (tengah) saat rapat kerja bersama Komisi X di Ruang Rapat Komisi X DPR, Jakarta, Selasa (24/1/2023). Nadiem memaparkan sejumlah capaian dan evaluasi program kerja Kemendikbudristek pada tahun anggaran 2022. Selain itu, Mendikbudristek juga menjabarkan rancangan dan rencana program kerja lembaganya pada 2023.

DPR Tagih Penuntasan Perekrutan Guru PPPK

Komisi X DPR mendesak Kemendikbudristek menuntaskan masalah pengangkatan guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan menyelesaikannya pada 2023 ini.

JAKARTA, KOMPAS — Pengangkatan guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN PPPK masih dibelenggu sejumlah masalah. DPR menagih janji kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menuntaskan masalah tersebut pada 2023.

Hal ini menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi X DPR bersama Kemendikbudristek, di Jakarta, Selasa (24/1/2023). Hampir semua perwakilan fraksi mendorong perekrutan guru ASN PPPK segera dituntaskan agar tidak semakin berlarut-larut.

"Komisi X DPR menekankan Kemendikbudristek menuntaskan pengangkatan guru yang lulus PPPK dan menyelesaikan permasalahan rekrutmen guru PPPK pada 2023," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf.

Dede juga meminta Kemendikbudristek melaporkan perkembangan perekrutan itu secara berkala kepada Komisi X DPR. Sebab, sepanjang 2022, pihaknya banyak beraudiensi dengan organisasi atau perwakilan guru yang menyampaikan aspirasi terkait berbagai masalah dalam pengangkatan guru ASN PPPK.

Masalah paling menonjol adalah pengajuan formasi oleh penda yang jauh lebih sedikit

dari kebutuhan. Imbasnya, banyak guru honorer telah lulus *passing grade* seleksi PPPK, tetapi belum jelas nasibnya karena tidak mendapatkan formasi.

Kebutuhan guru untuk ditempatkan di sekolah-sekolah negeri lebih dari 700.000 guru. Namun, usulan formasi dari 34 provinsi yang disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi baru sekitar 315.000 guru (*Kompas*, 24/9/2022).

"Kami harus bertanya apa yang disampaikan Menteri (Mendikbudristek) dalam ulang tahun PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), rencana jika formasi tidak disiapkan daerah, maka pemerintah pusat yang menyiapkan," katanya.

Dede menambahkan, pihaknya mengapresiasi realisasi anggaran Kemendikbudristek tahun anggaran 2022 sebesar Rp 81,29 triliun atau 95,73 persen berdasarkan surat perintah membayar (SPK).

Tahun ini dirampungkan

Anggota Komisi X DPR dari PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pereira, menyampaikan, seharusnya pengangkatan sekitar 40.000 guru lulus *passing grade* yang belum mendapatkan formasi dapat dirampungkan tahun ini. Begitu juga dengan persoalan penempatan guru yang jauh dari tempat kerja semula.

"Komitmen ini diperlukan sehingga para guru di daerah tenang dalam menjalankan tugas-tugasnya," ucapnya.

Belum lunasnya perekrutan guru ASN PPPK juga disinggung oleh anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar, Ferdiansyah. Padahal, pihaknya sudah 40 kali melakukan intervensi terhadap program tersebut, termasuk melakukan rapat dengan berbagai pihak.

"Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menuntut penuntasan perekrutan (guru ASN) PPPK sesuai janji Mendikbudristek dalam peringatan Hari Guru Nasional pada 25 November 2022," katanya.

Anggota Komisi X DPR dari Partai Nasdem, Hatih Megasari, mengaku menerima banyak pertanyaan terkait perekrutan guru ASN PPPK saat mengunjungi daerah pemilihannya. Mulai dari kejelasan nasib guru lulus *passing grade*, penda yang masih ragu menyediakan formasi karena terkendala penganggaran gaji, hingga kekhawatiran sekolah swasta karena kehilangan guru yang akan diangkat menjadi ASN PPPK.

"Hal itu memang opsional mereka. Namun, harus ada solusi konkret terkait sekolah-sekolah yang kehilangan guru," ucapnya.

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mendorong penda mengoptimalkan peng-

ajuan guru ASN PPPK. Menurut dia, tahun depan Kementerian Keuangan akan mengajukan peraturan baru, di mana dana alokasi umum (DAU) tidak akan dikirim ke penda jika tidak mengangkat ASN PPPK.

"Jadi, (DAU) hanya akan ditransfer kalau sudah mengangkat PPPK sesuai dengan formasi yang ditetapkan (pemerintah) pusat. Harapan besar kami, hal ini akan benar-benar mendorong penda," katanya.

Capaian 2022

Dalam rapat kerja, Nadiem juga memaparkan pencapaian kinerja program prioritas Kemendikbudristek pada 2022. Dalam digitalisasi pendidikan, misalnya, 71.991 sekolah telah menerima bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat sekitar 13,65 juta pengguna platform digital.

Sebanyak 150.731 sekolah telah mengimplementasikan kurikulum merdeka dan mengadopsi platform merdeka mengajar. Sementara 217.000 satuan pendidikan aktif menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).

Nadiem menuturkan, dalam aspek pelestarian kebudayaan, 485 cagar budaya telah ditetapkan, 718 warisan budaya tak benda juga sudah ditetapkan, dan 22.771 cagar budaya di-